



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3080-3087

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dalam Mewujudkan Transparansi Kinerja (Studi Kasus Di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara)

Nur Azizah Tanjung<sup>1✉</sup>, Nurbaiti<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [azizahtanjung7@gmail.com](mailto:azizahtanjung7@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta analisis dokumen terkait laporan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan transparansi, dan sebaliknya. Menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik dapat menjadi pedoman keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi pencapaian tata kelola yang baik. Visi dan misi kebijakan publik dalam mengelola akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai peraturan dan sanksi. Hasil ini berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut pedoman penerapan sistem akuntabilitas pemerintah di Indonesia.

Kata kunci: *Laporan akuntabilitas kinerja, Kinerja pemerintahan, Transparansi*

## Abstract

This research aims to analyze performance accountability at the North Sumatra Representative Audit Agency. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was obtained through interviews and observations, as well as analysis of documents related to performance accountability reports. The research results show that increasing accountability will increase transparency, and vice versa. Creating accountability for good performance can guide success or failure in achieving the vision and mission of achieving good governance. The vision and mission of public policy in managing the accountability of government organizations' performance is needed to provide information to the public and stakeholders regarding regulations and sanctions. These results contribute to the further development of guidelines for implementing government accountability systems in Indonesia.

*Keywords: Performance accountability report, government performance, transparency*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, saat ini menghadapi tuntutan masyarakat untuk mengakui tata kelola pemerintahan yang baik di negeri ini (Agung 2020). Kewajiban pelaksanaan pemerintah bersifat transparan jika tujuan rencana anggaran, perhitungan pengendalian, kerangka kerja rinci, dan konsistensi terhadap pedoman jelas (Pebrianti & Aziza 2019).

Akuntabilitas merupakan salah satu standar umum tata kelola keuangan pusat/daerah. Akses terhadap akuntabilitas keuangan melalui organisasi yang transparan akan semakin mengembangkan kesejahteraan masyarakat (Rahayu & Khoirunurrofik 2022). Dalam praktiknya, pemerintah pusat dan daerah serta badan publik lainnya diharapkan untuk menyajikan dan memvalidasi bentuk akuntabilitasnya melalui laporan keuangan periodik. Adanya akuntabilitas menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan standar yang telah ditetapkan, mengungkapkan secara jujur dan akurat mengenai hasil kinerja yang dilakukan sesuai dengan rencana dan perintah yang telah diberikan.

Hasil penelusuran Ombudsman pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas instansi publik di Indonesia mendapat laporan merah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lemahnya administasi publik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kurangnya perhatian terhadap kewajiban dan komitmennya, (2) tidak memadainya kerangka, strategi dan teknik sehingga mengakibatkan buruknya administrasi publik, dan kerusakan instrumen kerja yang diharapkan, (3) Keterampilan karyawan yang tidak memadai untuk tugas yang diberikan. Dampaknya, pekerjaan tidak sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan (Kushartiningsih & Riharjo 2021).

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan melakukan audit terhadap pemerintah daerah. Sejak pedoman pemerintah mengenai akuntansi moneter berbasis akrual mulai berlaku pada tahun 2015, perbaikan antara tahun 2016 dan 2020 menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian. Dari sisi tertentu, keberhasilan telah dicapai dalam pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah, dimana laporan keuangan pemerintah daerah dinilai Wajar Tanpa Pengecualian 70% yang masuk di BPK pada tahun 2016 dan meningkat sebesar 90% pada tahun 2020 (BPK RI 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua laporan keuangan saat ini ditampilkan dengan benar. Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dianggap selain wajar tanpa pengecualian terjadi karena laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan pedoman akuntansi pemerintah atau karena tidak cukup bukti untuk memvalidasi kesesuaiannya (Firmansyah, Yuniar, & Arfiansyah 2022).

Organisasi publik atau pemerintah Indonesia fokus pada transparansi operasional. Hal ini semakin diperkuat dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Open Government Partnership (OGP) pada bulan September 2011, dimana Indonesia fokus pada penerapan pemerintahan terbuka (Arkarizki, Irawati, & Sukarno 2023). Kebutuhan pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang berkeadilan dan meningkatnya kebutuhan akan informasi publik tidak ditanggapi secara serius oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia (Nuryani & Firmansyah 2020). Dengan adanya Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya otoritas publik di pusat dan daerah dapat dengan mudah melengkapi penyelenggaraan publik, khususnya penyediaan informasi.

Peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian akuntabilitas kinerja terhadap bentuk-bentuk transparansi kinerja di sektor pemerintahan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang pentingnya laporan akuntabilitas kinerja dalam memastikan transparansi kinerja di di Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Utara.

## KAJIAN TEORI

### Laporan Akuntabilitas Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan presentasi tahunan yang menjelaskan presentasi tanggung jawab organisasi dalam mencapai tujuan penting suatu lembaga. Laporan ini mencakup pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis, pengakuan atas pencapaian indikator-indikator utama organisasi, gambaran kinerja yang

memuaskan dan perbandingan kinerja dalam penerapan kinerja tahun berjalan dengan tahun berjalan, dalam rencana pelaksanaan kinerja 5 lima) tahun (Eprianto 2023).

Tujuan perencanaan dan pelaksanaan LAKIP adalah untuk memahami tanggung jawab lembaga pemerintah terhadap pihak yang mengeluarkan perintah/arahan. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Lembaga Pemerintahan (LAKIP) juga berlaku pada fungsi pemerintah daerah untuk meningkatkan fungsi dan kemampuan lembaga tersebut, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat dipercaya untuk menjalankan semua kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan prestasinya, keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan teknik organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Priyambodo et al. 2023). Akuntabilitas merupakan bagian dari penerapan GCG (Great Corporate Governance). Penerapannya ditujukan kepada pemerintah/organisasi untuk dapat menjamin tanggung jawab atas seluruh pengelolaan dan pengendalian sumber daya masyarakat. Dalam situasi ini, uraian informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah harus dilaporkan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat untuk meninjau kewajiban, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja (Fitri & Khotimah 2022).

Para ahli mengidentifikasi tiga komponen akuntabilitas: 1) tanggung jawab, atau komitmen untuk dasar tindakan seseorang; 2) penegakan, akibat yang dikenakan apabila kegiatan dan validasinya tidak memuaskan; dan 3) kesediaan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menanggapi tuntutan yang diajukan (Vian 2020). Singkatnya, akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban hukum berdasarkan undang-undang, untuk melayani atau memfasilitasi pemantau independen untuk melaporkan temuan atau data yang berkaitan dengan catatan keuangan yang ada, sesuai dengan persyaratan pemerintah.

#### Transparansi

Transparansi dalam pelayanan publik mencakup seluruh bagian pelayanan, misalnya persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, teknis administrasi, serta hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan dipublikasikan secara transparan secara operasional dengan tujuan membuat topik-topik ini mudah diakses dan nyata bagi publik, sehingga bentuk layanan ini bisa dibilang memiliki transparansi yang tinggi. Transparansi organisasi dapat mengacu pada persyaratan yang dibutuhkan pemangku kepentingan dan stakeholder dapat dipenuhi secara transparan (Dobusch & Heimstädt 2017).

Transparansi bisa menjadi solusi, mengurangi peluang korupsi, meningkatkan perhatian masyarakat dan mencegah institusi pemerintah memanipulasi kekuasaannya. Transparansi merupakan aturan yang ditularkan kepada semua orang yang menjamin akses atau kemungkinan memperoleh informasi yang berkaitan dengan berfungsinya badan publik, termasuk data penyelenggaraan pemerintahan, serta hasil yang diperoleh. Transparansi mengandung arti keterbukaan akses bagi seluruh masyarakat terhadap seluruh data yang berkaitan dengan pengelolaan data publik (Muhammad Adil, Mediaty, & Haliah 2022).

Transparansi dipandang sebagai sesuatu yang dapat memperbaiki pihak-pihak yang lemah dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan dengan mempublikasikan data. Pemahaman dan informasi masyarakat yang lebih baik mengenai organisasi pemerintah juga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, peningkatan jumlah individu yang berpartisipasi dalam kerja sama pembangunan, dan pengurangan pelanggaran hukum (Rahimallah & Ricky 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini membantu peneliti memahami kerangka penerapan akuntabilitas dan transparansi kinerja BPK perwakilan Sumatera Utara. Subjek penelitian adalah pegawai BPK perwakilan Sumatera Utara. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta telaah dokumen terkait laporan akuntabilitas kinerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan dan analisis data, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu bentuk pengelolaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari penyelenggaraan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, yang memerlukan tersedianya susunan strategis organisasi, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas, terukur dan jelas serta berfokus pada hasil lembaga pemerintah.

LAK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengemban tanggung jawab atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai visi dan misi penyelenggaraan tata kelola yang baik. Transparansi kinerja perwakilan BPK Sumut terlihat dari laporan akuntabilitas kinerjanya. Berdasarkan hasil validasi Direktorat PSMK, BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai kinerja sebesar 96,96. Nilai tersebut turun dibandingkan skor kinerja tahun 2019 yang sebesar 100,36. Menurunnya pencapaian target IKU disebabkan adanya perubahan pada sejumlah komponen IKU dibandingkan tahun sebelumnya akibat perubahan rencana strategis BPK. Meski demikian, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

Oleh karena itu, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendorong pengelolaan rencana belanja pemerintah untuk dapat dilaksanakan dengan baik, berhasil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan perubahan di bidang keuangan di Indonesia yang menyatakan bahwa akuntabilitas yang berorientasi pada hasil merupakan kaidah tata kelola keuangan negara yang pertama dan mendasar, serta seluruh uang yang dikeluarkan dalam APBN harus memberikan hasil dan manfaat yang nyata bagi negara serta masyarakat.

Perspektif yang baik bagi penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah adalah dengan adanya peraturan yang diturunkan kepada satuan kerja yang mengamanatkan terlaksananya manajemen kinerja dengan baik. Sifat peraturan yang ditetapkan akan menjamin legalitas satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya. Tanpa pengaturan manajemen kinerja yang spesifik tentu akan menghambat penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Salah satu elemen pendukung penerapan kerangka akuntabilitas pada organisasi pemerintah adalah adanya pedoman konkrit yang memungkinkan organisasi mempublikasikan informasi. Pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerja di kalangan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tanpa pedoman yang jelas untuk memantau pelaksanaan tata kelola pemerintahan, tentu akan menghambat implementasi kerangka akuntabilitas pada organisasi pemerintah.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, sering kali diasumsikan bahwa penerapan kerangka akuntabilitas kinerja pada organisasi pemerintah dan penerapan strategi merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan, keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dapat menjamin transparansi kinerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Utara, semakin meningkat akuntabilitas, semakin meningkat pula transparansi, dan sebaliknya. Dengan terbentuknya suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam

memberikan pelayanan dapat menciptakan pelayanan publik yang ideal dan berkualitas bagi masyarakat, yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2020. "The Effect of Financial Reporting Quality on Regional Governments' Performance Accountability." *KnE Social Sciences* 2020, no. 2007: 694–701. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6636>.
- Arkarizki, Dhafin, R Ira Irawati, and Dedi Sukarno. 2023. "Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung." *Jurnal Administrasi Negara*, Februari 14, no. 2: 594–605.
- BPK RI. 2021. "Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan." *Bpk Ri*, 1–2.
- Dobusch, Leonhard, and Maximilian Heimstädt. 2017. "Politics of Disclosure: Organizational Transparency as Multiactor Negotiation." *Public Administration Review* 00: 1–12. <https://doi.org/10.1111/puar.12895>.Politics.
- Eprianto, Idel. 2023. "Literature Review: Factors Affecting The Performance Accountability Report of Government Agencies (LAKIP) Local Government in Indonesia." *Accounting and Finance Studies* 3, no. 1: 277–300. <https://doi.org/10.47153/afs31.5312023>.
- Firmansyah, Amrie, Muhamad Rizal Yuniar, and Zef Arfiansyah. 2022. "Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 4, no. 2: 181–97. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>.
- Fitri, Meliyana, and Husnul Khotimah. 2022. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan." *Keunis* 10, no. 1: 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3013>.
- Kushartiningsih, R., and I. B. Riharjo. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 10, no. 3: 1–18.
- Muhammad Adil, Mediaty, and Haliah. 2022. "Accountability and Transparency in the Public and Private Sector." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 1, no. 6: 857–62. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i6.167>.
- Nuryani, and Amrie Firmansyah. 2020. "Determinants of Transparency in Financial Management on Local Government Websites: Evidence from Indonesia." *Humanities and Social Sciences Letters* 8, no. 2: 145–55. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.82.145.155>.

- Pebrianti, Sri, and Nurna Aziza. 2019. "Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies" 292: 396–410. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.62>.
- Priyambodo, Jati Bambang, Andy Fefta Wijaya, Wike, Sujarwoto, and Bambang Slamet Riyadi. 2023. "Implementation of Performance Accountability System for Government Institution: A Case Study in Indonesia." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2: 522–31. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.1288>.
- Rahayu, Wulan Sri, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. 2022. "The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 8, no. 2: 177–98. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.647>.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, and Ricky Ricky. 2023. "Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2: 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Vian, Taryn. 2020. "Anti-Corruption, Transparency and Accountability in Health: Concepts, Frameworks, and Approaches." *Global Health Action* 13, no. sup1. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>.